

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah mengkaji secara teoritis, kemudian mengumpulkan data di lapangan, menganalisa, data tersebut serta membahasnya kembali berdasarkan teori dan jurnal ilmiah, peneliti mendapat kesimpulan bahwa model kemitraan yang digunakan merupakan kontrak. Yang awalnya muncul dugaan bahwa kemitraan yang terjadi merupakan kemitraan utuh, yang memposisikan mutualitas dan identitas organisasi sama-sama memiliki presentasi yang tinggi. Namun pada kenyataannya pemerintah memberikan keleluasaan bagi organisasi nonprofit seni untuk melakukan pengambilan keputusan, sehingga menyebabkan penurunan peran. Pengambilan keputusan yang dimaksud untuk menentukan konsep apa yang akan dijalankan pada acara pameran seni rupa. Berdasarkan teori yang telah di kaji mutualitas berbicara tentang bagaimana masing-masing organisasi berperan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konsep pameran. Identitas organisasi sendiri berbicara tentang nilai pembeda antara suatu organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Model kontrak tepat dalam kemitraan ini, karena untuk memahami seni memiliki pendekatan yang berbeda. Seni tidak dapat diukur secara eksplisit seperti bidang ilmu lain, eksak misalnya. Untuk memahami seni perlu bekal seni yang kuat, misalnya dalam pengalaman dan strata pendidikan. Ketimbang pemerintah, YBY memiliki jumlah pengalaman dan latar belakang strata pendidikan tinggi seni yang lebih banyak. Sehingga

dengan modal ini, membantu YBY dalam menentukan tema yang tepat dalam acara BJ. Namun, model kemitraan kontrak juga memiliki resiko lain, karena sebenarnya acara BJ milik pemerintah dan pemerintah berhak memilih siapa saja sebagai pengampu. Jika suatu saat terjadi konflik, bisa saja pemerintah menunjuk mitra lain untuk mengampu BJ.

Equator merupakan nilai pembeda antara YBY dengan organisasi yang lainnya. Karena dengan menggunakan tema ini, YBY lebih mudah menentukan mitra mana yang mereka sasar. Mitra yang terjalin sebagian merupakan negara-negara perwakilan setiap benua yang dilintasi garis khatulistiwa. Dengan mitra yang sejenis menjadikan organisasi ini lebih rasional dalam berdiskusi, karena memiliki persoalan yang sama. Namun, ketimbang konsep yang diberikan, pemerintah cenderung melihat akuntabilitas kemitraan melalui ketepatan pelaporan keuangan dan jumlah penonton yang hadir dalam pameran BJ. Aspek ini yang membuat YBY berhasil memelihara hubungan dengan pemerintah.

5.2 Saran

a. Bagi YBY

1. Pada penelitian ini terlihat bahwa pihak organisasi nonprofit seni dalam hal ini YBY, memiliki kesadaran bahwa bermitra dengan pemerintah memerlukan waktu yang panjang sampai akhirnya dana bisa digelontorkan, sehingga membutuhkan koordinasi dengan intensitas yang tinggi. Prosedur yang panjang dilihat sebagai hal yang lumrah dan ini dimengerti oleh YBY. Kesiapan untuk menjalankan prosedur dan mempersiapkan proposal

anggaran dari jauh-jauh hari menjadi modal bagi organisasi nonprofit seni jika ingin bekerja sama dengan pemerintah.

2. Equator menjadi nilai pembeda antara YBY dengan organisasi yang lainnya.

Tema ini dirumuskan oleh yayasan, yang kemudian diterjemahkan oleh pihak penyelenggara acara, tema ini berbicara tentang masalah-masalah apa saja yang terjadi di negara sekitar khatulistiwa. Tema ini memudahkan organisasi nonprofit mendapatkan mitra yang tepat. Artinya, jika salah memilih mitra bisa saja kerjasama yang terjadi hanya di pahami oleh satu pihak saja.

3. Legalitas menjadi modal YBY ketika ingin melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi lain. Legalitas menjadi bukti bahwa organisasi benar-benar terlembaga dengan baik.

4. Melihat teori yang telah di kaji tentang dimensi mutualitas dan identitas organisasi. Diasumsikan bahwa awalnya kemitraan yang terjadi antara YBY dan pemerintah merupakan kemitraan yang utuh, yang memposisikan sama tingginya antara dimensi mutualitas dan identitas organisasi. Namun pada kenyataannya setelah di lakukan wawancara, menemukan bahwa dimensi mutualitas rendah dan identitas organisasinya sama-sama tinggi. Mutualitas berbicara tentang pengambilan keputusan, pihak organisasi perlu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk berbicara tentang tujuannya. Karena jika semua keputusan hanya berada pada pihak organisasi, bisa saja ada tujuan pemerintah yang tidak terlaksana.

5. Perlu di bentuk tim khusus yang bertugas meyakinkan pemerintah tentang pentingnya peristiwa BJ, sehingga dana yang digelontorkan sekurang-kurangnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini.
6. Equator merupakan tema yang memiliki rentang waktu tertentu. Artinya, tema ini perlu dipikir ulang ketika tenggat waktunya telah berakhir. Tema baru setelah perlu diberi perhatian lebih agar paling tidak, mendapatkan manfaat yang sama baiknya dengan tema Equator.

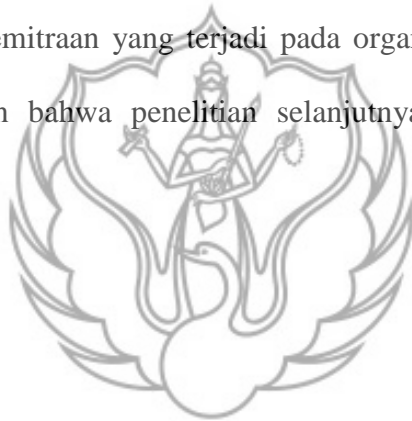
b. Bagi Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran pemerintah dalam membantu YBY sudah baik. Artinya, pemerintah sudah memberikan fasilitas gratis kepada pihak yayasan berupa peminjaman ruangan di TBY yang dapat dipergunakan sebagai sekretariat maupun tempat rapat. Sekaligus hal ini memberikan nilai guna pada fasilitas yang dimiliki pemerintah, seperti TBY.
2. Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Jogja yang diwakili Dinas Kebudayaan, mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Melalui adanya BJ semakin menguatkan posisi Jogja sebagai kota budaya dalam lingkup internasional. Manfaat lainnya, pemerintah memiliki hubungan diplomatis dengan negara mitra.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran pemerintah dalam membantu YBY sudah baik
4. Perlu dibuat kebijakan yang secara khusus mendorong perusahaan swasta untuk mendukung acara-acara kesenian, melihat Jogja sebagai kota budaya.

Bukan hanya dibuat, namun perlu juga penindakan tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi. Ini memudahkan organisasi seperti YBY untuk melakukan pengajuan bantuan dana kepada perusahaan swasta.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan penelitian kemitraan yang terjadi antara pihak swasta dan pemerintah. Padahal kenyataannya banyak pihak lain yang membantu YBY dalam melakukan kegiatan operasionalnya, perusahaan swasta misalnya. Sehingga pada penelitian ini dirasa belum cukup merepresentasikan kemitraan yang terjadi pada organisasi nonprofit seni. Maka, peneliti menyarankan bahwa penelitian selanjutnya meneliti mitra-mitra lain diluar pemerintah.



Daftar Pustaka :

- Anheier, H.K. (2005). *Nonprofit Organization: Theory, management, policy*. New York, USA: Routledge
- Boyce. C, Neale. P. (2006). *Pathfinder International Tool Series: Monitoring and Evaluation 2*. Watertown, USA: Pathfinder International
- Brinkerhoff. D. W, Brinkerhoff. J. M. (2011). *Public-private: Perspective on purposes, publicness, and good governance*. Public Administration and Development Journal. 31, 2-14
- Brinkerhoff. J. M. (2002). *Government-nonprofit partnership: A defining framework*. Public Administration and Development Journal. 22, 19-30
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mix method approaches*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Fox. C, Butler. G. (2004). *Partnership: where next?*. Safer Communities, Vol. 3 Iss 3 hlm. 36-44
- Glasbergen, P. (2007). *Partnerships Governance and Sustainable Development*. USA: Edward Elgar Publishing, Inc
- Humphries, R., Forder, J. (2010). "Optioning for funding longterm care: the partnership model compared". Quality Ageing and Older Adults, Vol. 11 Iss 4 h.30-35
- Kim. M. (2016). *Characteristic of civically engaged nonprofit arts organizations: The result of a national survey*. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly Journal. 1-24
- Liu, B.F. (2012). *Toward a better understanding of nonprofit communication management*. Journal of Communication Management, Vol. 16 Iss 4 pp. 388-404.
- Molnar A. (1989). *Forest conservation in Nepal: encouraging women's participation*. In Seeds: Supporting Women's Work in the Third World, Leonard A (ed.). Feminist Press, at CUNY: New York; 98-119.
- Moore, M.H. (2000). *Managing for value organizational strategy in for-profit, nonprofit, and government organizations*. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 29 (1): 183-204.
- O'Regan. K. M & Oster. S. M. (2000). *Nonprofit and voluntary sector quarterly*. Vol. 29, No.1, Supplement 2000, hlm 120-140.
- Thibodeau, B. D., Ruling, C-C. (2015). *Nonprofit organizations, community, and shared urgency : Lessons from the arts and culture sector*. The Journal Of Arts Management, Law, and Society, 45:156-177.
- Varela, X. (2014). *Core consensus, strategic variations: Mapping arts management graduate education in the United States*. The Journal of Arts Management, Law, and Society. 43:74-87
- Yogyakarta, Biennale Yayasan. (2014). *Laporan Pelaksanaan Biennale Jogja II Equator #2*. Edisi 4 Februari. Hlm 22
- Zarafonitou, C. (2004). *Local crime prevention councils and the partnership model in Greece*. Community Safety Journal. Vol 3 Iss 1. 23-28

Sumber internet:

Grace Sambooh, www.biennalejogja.com, diakses pada 27 November 2017 pada pukul 22.30 WIB

Laporan:

PIRAC. 2017. *Kesiapan Lembaga Filantropi Indonesia dalam Mendukung Pencapaian SDGs*. Diskusi Publik & Diseminasi Hasil Riset.

